

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bakhri Syaiful, Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan, (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Bambang, Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).

Darwan Prints, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, (Jakarta: Djambatan, 1998).

Fahrojih Ikhwan, Hukum Acara Pidana Korupsi, (Malang: Setara Press, 2016).

H. Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji, SH.& Rekan”, (Jakarta, 2006).

John M. Echols dan Hassan Shadaly, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977).

Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Alumni, 2007).

Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Acara Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).

Martiman Prodjohamidjojo, Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984).

- M. Akil Mochtar, Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi, (Jakarta: Q-Communication, 2006).
- Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993).
- Prof. Dr. Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Prof. Subekti, SH dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: Pratnya Paramita, 1982).
- R. Soesilo, Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum), (Bogor : Politeia, 1982).
- Soemitro Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990)
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Rajawali Pers, Jakarta, 2001).
- Sofyan Andi, Abdul Asis, Hukum Acara Pidana (suatu pengantar), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001)..
- Fahrojih Ikhwan, Hukum Acara Pidana Korupsi, (Malang: Setara Press, 2016).
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 2016).
- Tolib Effendi, Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia), (Malang: Setara Press, 2014).

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Bandung: PT Sumur, 1970).

Jurnal

Alcadini Wijayanti, R.B. Sularto, Tinjauan Yuridis Terhadap Perkembangan Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang, Law Reform, Volume 9, No. 1, 2013.

Ante Susanti, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, Lex Crimen, Vol. II, No. 2, April-Juni 2013.

Amelia Fransisca Wattie, Peran PPATK Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lex Crimen, Vol. IV, No. 3, Mei, 2015.

Bassang Tommy J., Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Deelneming*, Lex Crimen, Vol. IV, No. 5, Juli 2015.

Bastianto Nugroho, Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP, YURIDIKA, Vol. 31, No. 1, Januari 2017.

Dahlan, Distorsi Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian, Samudra Keadilan, Vol. 10, No. 1, Januari-Juli, 2015.

Fahrurrozi, Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP, Jurnal Ilmu Hukum, 30 April 2019.

Eka Lilis Lestari, Ridwan Arifin, Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019.

Ifrani, Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, Al'Adl, Volume IX, No. 3, Desember 2017.

I Made Sukadana, Amiruddin, dan Lalu Parman, Alat Bukti Keterangan Saksi Mahkota Dalam Perkara Pidana Pencurian, Jurnal Law Reform, Volume 14, No. 2, 2018.

- Kawengian Tiovary A., Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP, Lex Privatum, Vol. IV, No. 4, April 2016.
- Lasmadi Sahuri, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, INOVATIF, Vol. 2 No. 3, 2010.
- Lintogareng Jerol Vandrixton, Analisa Keyakinan Hakim Dalam Pengambilan Keputusan Perkara Pidana Di Pengadilan, Lex Crimen, Vol. II, No. 3, Juli 2013.
- Muhammad Musa, Penalaran Hakim Menerapkan Ajaran Penyertaan Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Riau-Kepri, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46, No. 4, Oktober, 2017.
- Ronaldo Ipakit, Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana, Lex Crimen, Vol. IV, No. 2, April, 2015.
- Siahaan Brian, Kajian Yuridis Tentang Saksi Pengungkap Fakta (*Whistleblower*), Lex Crimen, Vol. IV, No. 1, Januari-Maret 2015.
- Siregar Hendrik Fasco, Keharusan Sumpah Saksi Perspektif Filsafat Hukum Moral Immanuel Kant (Refleksi-Normatif Pasal 160 Ayat (3) KUHAP), Palrev, Volume 3 Issue 2, November 2020.
- Theresia Ngutra, Hukum dan Sumber-Sumber Hukum, Jurnal Supremasi, Volume XI Nomor 2, Oktober 2016.

Skripsi

- Eko Susilowati, “Kriteria Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)”, UIN Walisongo Semarang, 2017.

Tesis

Indriyanto Seno Adji dalam Dwinanto Agung Wibowo, Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana di Indonesia, (Jakarta: FH UI, 2011), halaman 74, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020.

Susanti Rahmi Dwi dan Barda Nawawi Arief, Tesis, Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerja sama (*Justice Collaborator*) Sebagai Alasan Peringatan Pidana Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional, Universitas Diponegoro

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011